

The Effect of Regional Income (PAD), Balancing Funds, and Total Population Againts Local Government Expenditure In West Java 2016-2018 Period

Rifki Yudha Aditama
Universitas Muhammadiyah Surakarta
b300160113@student.ums.ac.id
Eni Setyowati
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Es241@ums.ac.id

Keywords:

Regional Government Expenditures, Regional Original Income, Balancing Funds, Total Population

Abstract

This study focuses on the elements that affect local government spending with several independent variables, including inflation of local revenue, balancing funds, and population. This study relies secondary data from twenty-seven regencies/cities in West Java Province from 1996 to 2020, as well as panel data regression using Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), and Random Effect Model (REM) as analytic techniques. The Chow and Hausman tests are used in the estimate measures. According to the study's findings, the Regional Original Revenue, Balancing Fund has a negative and substantial influence on Regional Government Expenditures in West Java Province, however population has no significant effect on Regional Government Expenditures in West Java

Kata Kunci

Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk

Abstrak

Penelitian ini berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan beberapa variabel bebas, meliputi inflasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Jumlah Penduduk. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari dua puluh tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 1996-2020 dan regresi data panel dengan *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) sebagai metode analisis. Langkah-langkah estimasi menggunakan uji Chow dan Hausman. Temuan penelitian membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat

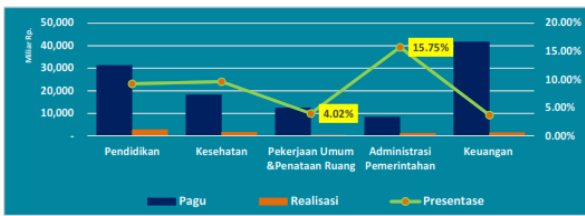
1. PENDAHULUAN

Hak, wewenang, serta kewajiban wilayah otonom guna menyelenggarakan serta mengendalikan aktivitas pemerintahan serta kepentingan penduduk setempat cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan ialah penafsiran dari otonomi daerah. Ciri pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ialah desentralisasi. Desentralisasi di Indonesia ditandai dengan perubahan struktur ikatan antara pusat dan daerah dengan pemberlakuan Undang-Undang (UU) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan desentralisasi adalah untuk

meningkatkan efisiensi peran pemerintah sebagai penyedia barang publik. Selanjutnya, desentralisasi diproyeksikan akan menghasilkan pemerataan pembangunan untuk setiap daerah. Pemerintah daerah dalam rangka menerapkan skema desentralisasi untuk masing-masing daerah perlu menghidupi dirinya sendiri (daerah itu sendiri) dengan sumber keuangannya. Partisipasi pemerintah wilayah dalam menggali serta meningkatkan kemampuan wilayah yang bermacam-macam selaku sumber pemasukan wilayah hendak membagikan pengaruh yang besar terhadap kinerja daerah dalam melaksanakan kewajiban pemerintahan,

pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat. Upaya pemerintah pemerintah daerah untuk membangun mekanisme partisipasi dalam proses penganggaran karena penganggaran partisipatif merupakan salah satu saluran yang secara langsung mempengaruhi berbagai hasil keuangan (Youngmin,2019)

Pemerintah daerah wajib menyalurkan dana berupa pengalokasian anggaran daerah dalam APBD untuk belanja pegawai, penambahan aset daerah atau bangunan umum dan infrastruktur. Pemerintah daerah memiliki komitmen kepada masyarakat yang harus dipenuhi. Dedikasi tersebut dapat ditunjukkan dengan pembangunan bermacam infrastruktur publik serta kenaikan mutu pelayanan publik. Belanja daerah, seperti belanja pemerintah daerah di Propinsi Jawa Barat, diperlukan untuk melaksanakan komitmen tersebut.



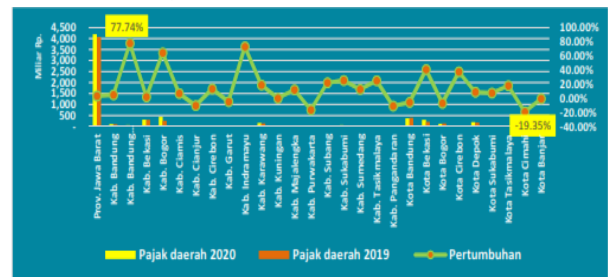
(Kemenkeu,2020)Gambar 1. Pagu dan Reliasasi Belanja Berdasarkan Urusan (Lima Urusan Tertinggi) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Triwulan I 2020.

Belanja daerah berdasarkan klasifikasi 40 kekhawatiran dalam lingkup pemerintah provinsi/kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat memiliki pagu yang paling besar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, administrasi pemerintahan, dan keuangan. Administrasi Keuangan memiliki tingkat realisasi terbesar sebesar 15,75%, sedangkan pekerjaan umum dan tata ruang memiliki tingkat realisasi terendah sebesar 4,02%. Provinsi Jawa Barat yang dibagi sebagai 37 Wilayah Tingkat II (29 Kabupaten serta 9 Kota) mempunyai penerimaan serta pengeluaran keuangan pemerintah yang terpisah buat tiap- tiap wilayah, dengan tiap pengeluaran pemerintah dicoba tergantung

pada kepemilikan finansial berbentuk pemasukan dari wilayah.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang dihasilkan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah, hasil pengelolaan kekayaan wilayah yang dipisahkan, serta pendapatan asli wilayah lain yang legal (Mardiasmo, 2018). Pendapatan asli daerah adalah uang yang dihasilkan oleh berbagai upaya pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana untuk kebutuhan daerah seperti mendukung kegiatan rutin dan pembangunan (Handayani & Suryati,2022)

Sebagai contoh pendapatan asli daerah, peneliti melaporkan bahwa realisasi pagu pajak daerah Q1-2020 mencapai 17,25%, naik 7,58% dibandingkan waktu yang sama di tahun 2019. Tingkat pertumbuhan terbesar adalah 77,4% di Kab. Bandung Barat, sedangkan terendah -19,35% di Kota Cimahi.



(Kemenkeu,2020)Gambar 2 Perbandingan Realisasi Penerimaan PAD (Pajak Daerah) Triwulan I 2019-2020

Karena daerah tidak mampu membayar pengeluarannya, jika sektor Pendapatan Asli Daerah digandakan saja, meliputi belanja rutin dan belanja pembangunan, pemerintah pusat menggariskan kebijakan guna membantu keuangan pemda dengan menyeimbangkan uang. Dana perimbangan merupakan dana yang ditransfer berasal pemerintah pusat pada Pemerintah Daerah dengan tujuan guna menutup kesenjangan fiskal serta pemerataan kemampuan fiskal antar wilayah pada rangka membantu pemda pada menjaga kemandiriannya pada menjalankan fungsi serta fungsi kemasyarakatannya (Yovita Wawo & Endah Sulistyowati, 2022).

Strategi dana perimbangan karena kemampuan keuangan pemerintah daerah yang masih sangat bergantung pada *income* pemerintah pusat. Dana perimbangan merupakan hasil dari kemampuan keuangan dan ekonomi daerah yang tidak merata, yang bertujuan meminimalkan ketimpangan keuangan horizontal antar daerah, kesenjangan vertikal antara pusat dan wilayah, mengatasi persoalan dampak pelayanan publik lintas wilayah, dan meningkatkan aktivitas ekonomi wilayah.

Dana Perimbangan adalah transfer dari Pemerintah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Mega Christia&Ispriyarso,2019)di Indonesia, DAU juga dikenal sebagai pemerataan fiskal antar daerah. Sedangkan DAK berfungsi sebagai dana untuk rencana darurat. Pemerintah daerah dapat membelanjakan dana tersebut secara bijak dan efektif untuk meningkatkan pelayanan publik dengan tetap mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Dana perimbangan dialokasikan berdasarkan potensi masing-masing daerah, menunjukkan karena tidak ada dua area yang sama; semakin besar potensi daerah maka semakin besar pula dana perimbangan yang diberikan untuk melaksanakan pengeluarannya, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Kabupaten dengan potensi daerah yang kuat, sumber daya alam yang menjanjikan, dan jumlah penduduk yang banyak akan mendapatkan perimbangan kas yang lebih besar.

Karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, maka pembangunan memiliki kaitan yang kuat dengan kesejahteraan. Penghuni atau penduduk digunakan sebagai input dalam proses pembuatan, dan tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Ni Putu Asri Diastari,2017;).

Penduduk adalah penikmat layanan pemerintah daerah; peningkatan kebutuhan penduduk sebagai akibat dari perluasan fasilitas dan infrastruktur publik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Erlina sulistiani&Arya Mahardika,2020). Standar hidup meningkat sebagai akibat dari setiap kenaikan pengeluaran pemerintah, sehingga ada hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan standar hidup penduduk (Jeff-Anyeneh,2020) Berlandaskan atas penjelasan sebelumnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai belanja pemerintah di 37 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Beberapa dari sifat-sifat ini dianggap memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai pengeluaran pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memilih judul skripsi : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Propinsi Jawa Barat Periode Tahun Anggaran 2016-2018”. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat PAD terhadap besaran nilai pengeluaran pemerintah daerah di Propinsi Jawa Barat. (2) Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap nilai pengeluaran pemerintah daerah di Propinsi Jawa Barat. (3) Menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Propinsi Jawa Barat. (4) Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Propinsi Jawa Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Income yang dihasilkan dan dipungut oleh daerah sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan definisi PAD (Mia Fajriati,2021).

Peningkatan pendapatan pemerintah meningkat, masyarakat menuntut lebih banyak pendidikan, hiburan, distribusi pendapatan yang lebih adil, dan umumnya lebih banyak

pelayanan publik yang harus disediakan pemerintah (Nduka J dkk,2019). Pemerintah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menginvestasikan dana fiskal yang signifikan, sementara pengeluaran pajak, defisit dan utang adalah diperluas di samping pendapatan anggaran (Shaolong Wu & Muhua Lin, 2020).

PAD memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber pendanaan daerah karena digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Pendapatan dari potensi daerah mempengaruhi pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat.

2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah transfer uang dari pemerintah pusat lalu dialirkan ke pemerintah daerah yang berguna mengimbangi ketidakseimbangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal daerah untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi makro karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dari jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka pengeluaran pemerintah untuk fasilitas dan layanan untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi biasanya setiap tahun (Nduka J dkk,2019)

Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Tujuan perimbangan keuangan adalah untuk meningkatkan desentralisasi fiskal dan menghilangkan ketimpangan keuangan antara pusat dan daerah, serta antar daerah, dengan tetap menjaga netralitas fiskal dan pelayanan daerah yang berkualitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berfungsi sebagai mekanisme pendanaan untuk mewujudkan desentralisasi. Dana penyeimbangan anggaran berguna untuk pemerintah kota untuk menyediakan layanan

yang didanai pemerintah (Nanda Fitrah Gemilang Hasibuan, 2021). Dana Perimbangan upaya untuk menutup kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Husaeri Priatna, 2019). Pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk perimbangan anggaran (APBN) (Billy Yanis Saputra dkk, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sumber uang dari dana perimbangan akan berdampak signifikan terhadap pengeluaran pemerintah daerah. Akibatnya, semakin besar dana perimbangan maka semakin besar belanja pemerintah daerah, karena daerah dengan dana perimbangan yang besar memiliki nilai belanja daerah yang lebih tinggi. Dana pemerintah dialokasikan untuk barang publik, yang sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan sosial ekonomi dan lapangan pekerjaan sosial (Arvin, 2021). Program dana pemerintah bertujuan untuk membantu upaya pertumbuhan jangka panjang, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kinerja makroekonomi dengan merangsang investasi publik (proyek infrastruktur) (Ilker Kaya & Ozgur Kaya, 2020).

Jumlah penduduk dan luas lahan merupakan indikator pemenuhan kebutuhan fiskal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004. Jika dibandingkan dengan lokasi dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah, diperlukan lebih banyak sarana dan prasarana untuk pelayanan publik di daerah padat penduduk. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan output dengan meningkatkan laju perluasan pasar baik di dalam maupun di luar negeri, yang dibuktikan dengan bukti empiris. Pertumbuhan populasi yang cepat, bersama dengan kemajuan teknis, akan mendorong penghematan serta penggunaan skala ekonomi di bidang manufaktur (Fitriana & Sudarti, 2018).

2.3 Jumlah Penduduk

Perluasan populasi diperlukan dan bukan suatu hal yang negatif, melainkan faktor vital

yang dapat merangsang pembangunan dan keberhasilan ekonomi. Pendapatan berdampak pada orang-orang. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin besar pula pendapatan yang dapat digali, khususnya pendapatan asli daerah (Handayani, 2022).

Disisi lain bertambahnya jumlah penduduk juga menambah beban pemerintah daerah dengan penyediaan sarana dan prasarana public, dan hal ini berimbas terhadap besarnya nilai pengeluaran daerah. Produktivitas dalam tenaga kerja akan ditingkatkan jika pemerintah memperbaikinya pengeluaran pendidikan dan kesehatan di satu sisi, sedangkan di sisi lain, akan ada apresiasi luar biasa dalam investasi dalam negeri jika akan ada keberlanjutan dalam infrastruktur pengeluaran (Jeff-Anyeneh, 2020)

Bayaknya jumlah penduduk di Indonesia merupakan salah satu faktor pertumbuhan penduduk adalah angka kelahiran. Akibatnya, masalah kependudukan menjadi sangat penting di Indonesia. Jika angka ini terus meningkat, niscaya akan semakin banyak kesulitan masyarakat (Karyana Y,2015) menegaskan bahwa kelahiran dan pergerakan manusia di suatu tempat meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di lokasi tersebut.

Karena kematian, populasi lokal telah menurun. Pertumbuhan populasi dihitung dengan membandingkan populasi saat ini dengan populasi awal di wilayah atau negara tertentu (missal P_0) dengan populasi masa depan (missal P_t). Rumus geometri, dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk (bunga majemuk). Rumus pertumbuhan geometris mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk (laju pertumbuhan atau r) konstan sepanjang waktu, sebagai berikut:

$$P_t = P_0 (1+r)^t \text{ (Bps, 2010)}$$

Keterangan:

P_0 = jumlah penduduk awal

P_t = jumlah penduduk t tahun kemudian

r = tingkat pertumbuhan penduduk

t = jumlah tahun dari 0 ke t .

Perhitungan menunjukkan bahwa dari tahun 1995 hingga 2000, Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 1,11%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia pada tingkat 1,11 persen per tahun dari tahun 1995 sampai 2000. Ramalan penduduk tahun depan didasarkan pada tingkat pertumbuhan ini. Berdasarkan tantangan dalam penelitian ini, serta latar belakang dan kerangka teori, diperoleh hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh tingkat PAD dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah daerah Propinsi Jawa Barat.
2. Diduga terdapat pengaruh Dana Perimbangan dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah daerah Propinsi Jawa Barat
3. Diduga terdapat pengaruh Jumlah Penduduk dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah daerah Propinsi Jawa Barat

3. METODE PENELITIAN

Metodologi kuantitatif yang digunakan pendekatan ilmiah yang memperhitungkan kuantitas dan kualitas fenomena dan komponen yang dipelajari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan jumlah penduduk terhadap nilai belanja pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat. Data sekunder digunakan sebagai sumber dalam penelitian.

Pengeluaran pemerintah daerah sebagai variabel terikat. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP) dan Jumlah Penduduk (JP) sebagai variabel bebas, dan Belanja Daerah (BD) sebagai variabel intervening. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber pengambilan data selaku data sekunder.

Penelitian ini menggunakan teknik analitik time series dengan data panel atau pooled data, yaitu kumpulan data yang disusun secara kronologis. Model regresi data panel

menggunakan fungsi persamaan yang ditunjukkan di bawah ini: (Arikunto, 2016).

$$PPD_{it} = \beta_i + \beta_1 PAD_{1it} + \beta_2 DP_{2it} + \beta_3 JP_{3it} + \mu_{it}$$

Keterangan :

PPD = Pengeluaran pemerintah daerah (milyar rupiah)

PAD = Pendapatan asli daerah (milyar rupiah)

DP = Dana perimbangan (milyar rupiah)

JP = Jumlah penduduk

i = Unit cross section setiap provinsi

t = Jumlah tahun yang diteliti 2016-2018

β_1 = Parameter variable terkait

Model analisis dengan regresi data panel, minimal ada tiga prosedur estimasi. Antara lain (Creswell J, 2018):

1. Pooled OLS, mengumpulkan semua data di seluruh lokasi dan kurun waktu, lalu memperkirakan seluruh kumpulan data menggunakan teknik OLS.
2. Fixed effect (*Covariance Model*), yaitu menghapus factor penjelas apapun yang mungkin menghasilkan deret waktu atau penyadapan antar ruang.
3. Random effect (*Error Component Model*), variasi dalam nilai dan orientasi asosiasi antar tempat diharapkan bersifat acak, tetapi secara eksplisit dikumpulkan dan dinyatakan sebagai kesalahan residual

Beberapa eksperimen akan dilakukan untuk memilih model yang optimal, antara lain: *Likelihood Ratio Test / Chow Test* digunakan untuk memilih model antara *pooled OLS* dan *fixed effect model*. Uji hipotesis yang digunakan adalah Uji Hausman, yang digunakan untuk memilih model antara efek tetap dan acak. Uji hipotesis terdiri dari uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Uji Chow dan Hausman digunakan penelitian ini untuk menentukan model estimasi optimal antara *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Jika uji *Chow* memilih *Pooled Least Square* (PLS) dan uji Hausman diperoleh *Random Effect Model* (REM), maka

harus dilakukan uji tambahan yaitu uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk menentukan model estimasi optimum dari *Pooled Least Square* (PLS) dan *Random Effect Model* (REM). Tabel 1 merangkum hasil estimasi model ekonometrika terlebih dahulu dengan menggunakan teknik *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), serta hasil uji pemilihan model.

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometrika Regresi Data Panel-Cross section

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
C	13.72055	29.23205	16.26175
LOG(PAD)	0.038286	0.166266	-0.052426
LOG(DP)	-0.041301	0.450339	-0.108510
LOG(JP)	0.598056	0.604701	0.680910
R^2		0.98797	
<i>Adjusted. R²</i>	0.924116	1	0.806263
<i>Statistics F</i>	0.921159	0.981130	0.798715
<i>Prob. Statistics</i>	312.5672	144.4341	106.8156
<i>F</i>	0,0000	0,0000	0,0000
Uji Pemilihan model			
(1) Chow			
Cross- Section $F(26,51) = 10.412254$; Prob. $F(26,51) = 0,0000$			
(2) Hausman			
Cross-Section random $\chi^2(3) = 13.021890$; Prob. $\chi^2 = 0.0046$			

Sumber: BPS, diolah

Uji Chow dan Hausman membuktikan bahwa (FEM) dipilih sebagai model estimasi terbaik, yang dibuktikan dengan probabilitas atau signifikansi empiris statistik F dan χ^2 , keduanya memiliki nilai 0,0000 (0,01). Tabel 2 dan 3 menunjukkan seluruh hasil estimasi dari model estimasi FEM.

Tabel 2 . Model Estimasi Fixed Effect Model(FEM)

$Log PPD = 9,23205 - 0,166266 \log PAD_{it} - 0,450339 \log DP_{it} + 0,604701 \log JP_{it}$	(0,0049)*	(0,0191)**
	(0,4280)	
$R^2 = 0,987971$; $DW = 2,287203$; $F = 144,4341$; Prob. $F = 0,0000$		

Sumber: BPS, diolah. Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 0.01$;

Signifikan pada $\alpha = 0.05$; *Signifikan pada $\alpha = 0.10$; Angka di dalam kurung adalah probabilitas nilai statistic t.

Tabel 3. Efek dan Konstanta Wilayah

NO	Kabupaten/kota	Efek Wilayah	Konstanta
1	Bandung	0.297990	0.297990
2	Bandung Barat	0.219139	-0.219139
3	Bekasi	0.317556	0.317556
4	Bogor	0.564275	0.564275
5	Ciamis	0.135066	-0.135066
6	Cianjur	0.187994	0.187994
7	Cirebon	0.130926	0.130926
8	Garut	0.259090	0.259090
9	Indramayu	0.065254	0.065254
10	Karawang	0.346624	0.346624
11	Bandung City	0.239456	0.239456
12	Banjar City	0.473860	-0.473860
13	Bekasi City	0.005506	0.005506
14	Bogor City	0.273491	0.273491
15	Cimahi City	0.505236	-0.505236
16	Cirebon City	0.322720	0.322720
17	Depok City	0.223920	-0.223920
18	Sukabumi City	0.273016	-0.273016
19	Tasikmalaya City	0.383603	-0.383603
20	Kuningan	0.009189	0.009189
21	Majalengka	0.071198	0.071198
22	Pangandaran	0.613471	-0.613471
23	Purwakarta	0.327169	-0.327169
24	Subang	0.152151	-0.152151
25	Sukabumi	0.078489	0.078489
26	Sumedang	0.043323	0.043323
27	Tasikmalaya	0.093550	0.093550

Sumber: BPS, Diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa model perhitungan FEM memiliki probabilitas atau signifikansi statistik empiris $F = 0,0000$ (0,01) dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,987971, menunjukkan bahwa model estimasi FEM memiliki kemampuan prediksi yang sangat tinggi. Namun daya prediksi ini harus diinterpretasikan secara hati-hati, karena selain ketiga variabel dalam model ekonometrika, ternyata dua variabel yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

berpengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan probabilitas statistik atau signifikansi empiris $t = 0,0049$ (0,01), dan variabel Dana Perimbangan (DP) berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah dengan probabilitas statistik atau signifikansi empiris $t = 0,01$ (0,0 (0,05). PAD), semakin besar penyaluran pembiayaan Belanja Modal. Selain itu, pertumbuhan sumber pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah yang kuat. Pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi akan mendorong pemerintah daerah lebih bertanggung jawab secara fiskal kepada masyarakat dengan menitikberatkan pada seluruh pengeluaran yang dipusatkan pada masyarakat dalam bentuk pemenuhan fasilitas daerah dan infrastruktur. Artinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan memperpanjang umur aset publik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nabila Khoirunnisa, 2022) dan (Ayu Candra Handayani, 2019) Ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap keuangan masyarakat dengan mengevaluasi semua pengeluaran yang berorientasi pada masyarakat dalam bentuk pemenuhan sarana dan prasarana daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati. Implikasinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendorong perpanjangan masa manfaat aset pelayanan publik, penambahan aset pelayanan publik, dan terpeliharanya kualitas pelayanan publik (Oktavia Laila Nur Rahmawati, 2022).

Dana Perimbangan digunakan untuk menyediakan dana untuk layanan pemerintah seperti pemeliharaan dan pembangunan fasilitas baru untuk rumah sakit, sekolah, dan lembaga sertifikasi. Penyediaan fasilitas seperti alat kesehatan, peralatan laboratorium, perabot sekolah seperti meja dan kursi, perawatan mesin di organisasi pemerintah, layanan ambulans, dan lain sebagainya adalah contohnya. Dana Perimbangan memberikan

bantuan yang signifikan dalam proses perluasan jumlah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mengikuti alur penalaran ini, orang sampai pada kesimpulan bahwa jika Dana Perimbangan ditingkatkan, akan ada lebih banyak uang yang tersedia untuk Belanja Modal. Hasil investigasi ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Adi Setiawan, 2019) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak pada belanja modal.

4.2 Pembahasan Penelitian

Korelasi antara pendapatan asli daerah dengan koefisien regresi sebesar $-0,166266$ adalah linier. Misalnya, penurunan pendapatan asli daerah sebesar 1% akan berdampak pada pemotongan belanja pemerintah daerah sebesar 16,66%. Selain itu, peningkatan belanja pemerintah daerah sebesar 16,66% diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 1%.

Koefisien regresi untuk variabel Dana Perimbangan adalah $-0,450339$, menunjukkan hubungan linier-linier. Dengan kata lain, pemotongan Dana Perimbangan sebesar 1% akan mengakibatkan pemotongan belanja pemerintah daerah sebesar 45,03%. Pengeluaran oleh pemerintah daerah diperkirakan akan naik sebesar 45,03% jika pendapatan asli daerah hanya naik 1%.

Nilai konstanta tertinggi sebesar $0,564275$ terdapat di Kota Bogor. Artinya karena pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kependudukan, Provinsi Jawa Barat memiliki pengeluaran Pemerintah Daerah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Karawang dan Kota Cirebon merupakan dua daerah paling stabil berikutnya setelah Kota Bogor.

Konstanta terendah adalah $-0,613471$, dan termasuk dalam Kabupaten Pangandaran. Dengan kata lain, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat, belanja Pemerintah Daerah tergolong rendah karena pengaruh variabel Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk. Setelah Kabupaten Pangandaran, Kota Cimahi dan Kota Banjar memiliki konstanta terendah dari kabupaten manapun di tanah air.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Hasil analisis regresi dengan menggunakan *Fixed Effect Mofel* dan uji validitas dengan tingkat signifikan (0,01) untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Penduduk di Jawa Barat menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan probabilitas atau signifikansi statistik empiris $t = 0,0049$ (0,01) dan bahwa Dana Perimbangan (DP) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan probabilitas atau signifikansi statistik empiris t . Meskipun pengeluaran pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh jumlah penduduk

5.2 Saran

Berdasarkan temuan kajian, peneliti menyarankan kepada pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat untuk terus menggali dan mengelola potensi agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi terus meningkat dan taraf hidup masyarakat meningkat.

Berikut adalah sumbangsih hasil penelitian kepada berbagai pihak: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan sebagai referensi dan kemajuan ilmu pengetahuan bagi civitas akademika, khususnya yang berminat untuk meneliti aspek-aspek yang dapat berdampak pada belanja pemerintah daerah dan dapat digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi dan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan dalam pemantauan Pengeluaran Pemerintah Daerah di suatu daerah bagi pemerintah. Kajian ini dirancang untuk menjadi sumber dan data

yang lebih empiris bagi sarjana masa depan yang tertarik untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Setiawan. (2019). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017*.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arvin, M. B., Pradhan, R. P., & Nair, M. S. (2021). Are there links between institutional quality, government expenditure, tax revenue and economic growth? Evidence from low-income and lower middle-income countries. *Economic Analysis and Policy*, 70, 468–489. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.03.011>
- Ayu Candra Handayani. (2019). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, SILPA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2016*.
- Billy Yanis Saputra dkk. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1).
- Bps. (2010). "Badan Pusat Statistik".
- Creswell J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Fitriana, N., & Sudarti, S. (2018). ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU. In *Jurnal Ilmu Ekonomi* (Vol. 2).
- Handayani, A. T., Suryati, T., Marsela, H. A., Luqmana, D., & Anwar, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *SOROT*, 17(1), 41. <https://doi.org/10.31258/sorot.17.1.41-57>
- Husaeri Priatna, J. P. (2019). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG*. <http://www.balebandung.com>,
- Ilker Kaya, & Ozgur Kaya. (2020). Foreign aid, institutional quality and government fiscal behavior in emerging economies: An empirical investigation. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 76, 59–67. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2019.08.004>
- Jeff-Anyeneh, S. E., Ananwude, A. C., Ezu, G. K., & Nnoje, A. I. (2020). Government expenditure and standard of living in an emerging market in Africa–Nigeria. *Economic Journal of Emerging Markets*, 12(2), 167–178. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol12.iss2.art4>
- Karyana Y., & W. L. (2015). *Pengembangan Metode Komponen dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2050 Menggunakan Metode Campuran dengan Pendekatan Demografi Multiregional*. 467–476.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi.
- Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). *DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA*.
- Mia Fajriati, Z., Dina Rifatul Wafa, Rika Amanda Heryaningrum, & Saiful Anwar. (2021). ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT. *Wacana Publik*, 15(02), 75–85. <https://doi.org/10.37295/wp.v15i2.63>
- Nabila Khoirunnisa, M. (2022). *Analysis of the Factors that Affect the Capital Expenditure of the Central Java Provincial Government*.

- Nanda Fitrah Gemilang Hasibuan, S. T. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 4(2), 127–140. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i2.7771>
- Nduka, J. A., Ananwude, A. C., & Osakwe, C. I. (2019). Expenditure of the Federal Government of Nigeria: Effect on the Standard of Living of her Citizens. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(4). <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v9-i4/6658>
- Ni Putu Asri Diastari, M. K. S. B. W. W. (2017). *PENGARUH INVESTASI, DANA PERIMBANGAN DAN PAD TERHADAP KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI*. 10.
- Oh, Y., Jeong, S. H., & Shin, H. (2019). A strategy for a sustainable local government: Are participatory governments more efficient, effective, and equitable in the budget process? *Sustainability (Switzerland)*, 11(19). <https://doi.org/10.3390/su11195312>
- Oktavia Laila Nur Rahmawati, E. S. R. F. (2022). *Analysis of Factors Affecting Regional Original Revenue in Yogyakarta Special Regional Province 2016-2020*.
- Kemenkeu Provinsi Jawa Barat. (2020). *KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN*. djpb.kemenkeu.go.id
- Shaolong Wu, & Muhua Lin. (2020). Analyzing the Chinese budgetary responses to COVID-19: balancing prevention and control with socioeconomic recovery. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 929–937. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-08-2020-0142>
- Sulistiani, E., Samudra Mahardhika, A., & Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa, S. (2020). Anteseden belanja daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah. *FORUM EKONOMI*, 22(2), 326–333. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- Yovita Wawo, & Endah Sulistyowati. (2022). *PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR)*.